

**RELASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BALAI AGAS, KECAMATAN BELIMBING,
KABUPATEN MELAWI DI LIHAT DARI PERSPEKTIF GOVERNANCE**

SKRIPSI



Disusun Oleh

NIKODEMUS YORGI BARABIS

18520197

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023**



HALAMAN JUDUL

**RELASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BALAI AGAS, KECAMATAN BELIMBING,
KABUPATEN MELAWI DI LIHAT DARI PERSPEKTIF GOVERNANCE**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA




2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>(Dr. Rijel Samaloisa)</u> Pembimbing	
<u>(Drs. Jaka Triwidaryanta M.Si)</u> Penguji I	
<u>(Drs. Yulianus Gatot M. Si)</u> Penguji II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIKODEMUS YORGI BARABIS
Nomor Induk Mahasiswa : 18520197
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi Di Lihat Dari *Perspektif Governance***. Benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan



NIKODEMUS YORGI BARABIS

MOTTO

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematikan Di Dunia Karena Dengan Pendidikan, Anda Dapat Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Hiduplah Seolah Engkau Mati Besok, Belajarlah Seolah Engkau Hidup Selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Agama Tanpa Ilmu Adalah Buta, Ilmu Tanpa Agama Adalah Lumpuh”

(Albert Einstein)

“Pencobaan-Pencobaan Yang Kamu Alami Ialah Pencobaan Biasa, Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia, Sebab Allah Setia Dan Karena Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatanmu, Pada Waktu Kamu Dicobai Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar , Sehingga Kamu Dapat Menanggungnya”

(1 Korintus 10:13)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi Di Lihat Dari *Perspektif Governance*”** ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa „APMD“ Yogyakarta.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa yang telah membimbing saya dengan sabar, dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya. Terimakasih atas semuanya yang sudah diberikan selama ini.
4. Kepada kedua orangtua dan keluarga yang saya cintai dan yang saya kasihi Ayah David, S.sos, Ibu Irene Neli, S.pd, Adik Eligia Ingen, Adik Nae Mele

Kertina, Dan Yoseva Meta Kristina, S.M. yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses pengerjaan skripsi.

5. Terimah kasih Kepada teman-teman seperjuangan yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan masukan dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Terimah kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Terimah kasih kepada Kepala Desa Balai Agas Bapak Yulianus Jaga yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Penulis

NIKODEMUS YORGI BARABIS

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL	10
a. Kajian Literatur	10
1. Governance.....	14
2. Pemerintah Desa.....	16
3. Masyarakat Adat	20
4. Pembangunan Desa	22
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	24
G. METODE PENELITIAN	25
1. Jenis Penelitian.....	25
H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	27

I. TEKNIK ANALISIS DATA.....	29
BAB II PROFIL DESA BALAI AGAS	34
A. SEJARAH DESA BALAI AGAS	34
B. VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA BALAI AGAS	36
C. KONDISI GEOGRAFIS DESA BALAI AGAS	37
D. DEMOGRAFIS DESA BALAI AGAS	39
E. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DESA BALAI AGAS	39
F. SARANA PRASARANA DESA BALAI AGAS	40
G. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BALAI AGAS..	42
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. ANALISIS RELASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BALAI AGAS, KECAMATAN BELIMBING, KABUPATEN MELAWI DI LIHAT DARI PERSPEKTIF GOVERNANCE	44
B. RELASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BALAI AGAS, KECAMATAN BELIMBING, KABUPATEN MELAWI DILIHAT DARI PERSPEKTIF GOVERNANCE	45
C. PRESEPSI MASYARAKAT ADAT DESA BALAI AGAS DALAM PEMBANGUNAN YANG KURANG OPTIMAL	46
BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	64
SURAT PERMOHONAN IZIN TUGAS	61
PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	62
PEDOMAN WAWANCARA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

INTISARI

Pemerintah desa memiliki sifat dan karakteristik dalam pelayanan, adapun sifat yang wajib dimiliki yaitu adanya transparansi dengan masyarakat atau penduduk sehingakan masyarakat dapat mengetahui rancangan kerja maupun pembangunan bagi desa. Pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, adapun upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk infrastrur baik fisik maupun non fisik yang dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah seharusnya melibatkan dan melakukan musyawarah dengan masyarakat, akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi ?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan Analisis.

Hasil penelitian mengenai relasi pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan di desa balai agas, kecamatan belimbing, kabupaten melawi maka penulis mengambil kesimpulan yaitu, dilihat dari pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan aparatur Desa, kurangnya pemantaun yang khusus terhadap kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa, kurangnya relasi masyarakat adat dalam mengoptimalkan pembangunan perdesaan antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa.

Kata kunci : *Relasi Masyarakat Adat, Pembangunan Desa*

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Data Informan	27
Tabel II.1 Penggunaan Tanah	38
Tabel II.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	39
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	40
Tabel II.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan	40
Tabel II.5 Jumlah Fasilitas Peribadatan	41
Tabel II.6 Jumlah Fasilitas Umum Desa Balai Agas	41
Tabel II.7 Jumlah Fasilitas Kesehatan	41
Tabel II.8 Jumlah Prangkat/ Pamong Desa Balai Agas	42

DAFTAR GAMBAR

Bagan II.1 Sturktur Organisasi Desa Balai Agas	43
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Studi mengenai relasi pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa hal menarik untuk dikaji. Hal ini karena Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemampuan suatu negara untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang paling utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, maka perlu dibentuk sebuah paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Pemahaman atau makna dari Undang-undang yaitu manusia sebagai makhluk hidup tidak akan mungkin lepas dari suatu pembangunan, dan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam merupakan hak yang dimiliki oleh negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Perkembangan dan pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak seimbang dengan pembangunan dilakukan, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pada saat ini masyarakat tidak merasakan atau tidak mendapatkan pembangunan secara optimal, karena pembangunan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga pembangunan kerap menjadi persoalan khususnya di dalam masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguana Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Fenomena tentang relasi pemerintah desa dan masyarakat adat menjadi suatu permasalahan yang penting untuk dilakukan pengkajian, dikarenakan pebangunan suatu desa adalah salah satu bentuk ketahanan yang harus dikembangkan. Hal ini sesuai dengan isi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 123 ayat 1 dan 2 Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, yang dapat diperoleh dari suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta di

peroleh dari anggaran yang sah yang terdiri dari : penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, pembangunan infrastruktur antar perdesaan. (Bhudianto, W, 2014).

Amanat Undang-Undang memberikan suatu peluang untuk perkembangan kebijakan dalam tata kelola desa secara nasional. Desa memiliki 2 asas yaitu

Rekognisi yang berarti suatu pengakuan negara terhadap hak yang dimiliki desa dalam memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa serta hak asal usul desa. Asas yang berikutnya yang dimiliki desa yaitu subsidiaritas yang berarti suatu penetapan kewenangan dalam skala lokal dan pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat desa, adanya asas yang dimiliki desa menjadikan tugas dan tanggung jawab desa menjadi lebih berat karena harus mengurus dan bertanggung jawab untuk pemerintahannya sendiri (Eko, 2015). Dengan adanya pengaturan kedua asas tersebut desa kini secara mandiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri salah satunya yaitu pembangunan Desa.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui relasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan, melihat kemampuan aparatur dalam bekerja menyelesaikan target pencapaian dalam pembangunan infrastruktur perdesaan agar semakin baik dan faktor pendukung dan penghambat proses pembangunan infrastruktur perdesaan. Keberadaan pembangunan perdesaan sebagai salah satu dimensi otonomi desa dalam kapasitas kemandirian yang harus dimiliki desa, untuk mendukung berbagai program penyelenggaraan pembangunan. Hal ini, juga telah menimbulkan berbagai

permasalahan seperti kurangnya pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan apratur Desa, kurangnya pemantaun yang khusus terhadap kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa, dan kurangnya relasi masyarakat adat dalam mengoptimalkan pembangunan perdesaan. Sehingga, Fenomena ini tentu saja berpengaruh pada pembangunan Desa Balai Agas sampai saat ini.

Dalam literature Jurnal Litigasi “ Kamandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan” Ermaya, B. S. (2016), bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antara pemerintah desa dan maskyarakat adat dalam pembangunan desa, dengan pendekatan Undang-Undang, hasil penelitian ini menunjukkan bawah pembangunan desa memiliki peran penting berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan yang dilakukan menunjukkan bahwa terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mempekuat sistem pemerintahan agar dapat menggerakkan masyarakat sehingga adanya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan administrasi desqa semakin efektif serta meluas. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka membangun manusia seutuhnya, pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di desa. Namun pembangunan desa saat ini masih belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa sehingga tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan adalah suatu trilogi yaitu pemerataan pembangunan dan hasil -hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat

dan dinamis. masyarakat adat sebagai salah satu sumber daya pembangunan melakukan perlawanan atas pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat adat. Selain itu, Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama, yang diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dalam pembangunan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa diharapkan mampu mengakui dan menghormati atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya, upaya perlindungan untuk menjamin dan melindungi masyarakat adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta upaya pemberdayaan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat yang ada di desa.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja Dilingkungan Pemerintahan Pasal 2, Pasal 4 menyebutkan bahwa pengembangan budaya kerja sebagai salah satu instrument reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara systematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan nilai budaya kerja dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat adat adalah salah satu bagian dari pembangunan desa yang mampu menopang penyelenggaraan pemerintah Desa baik secara ruang lingkup kerjasama dalam pembangunan desa maupun kerjasama dalam menciptakan nilai budaya. Kerjasama dalam pembangunan desa agar terciptanya kesejahteraan Masyarakat desa sebagai mana yang dimaksud dalam

(PERBUP) Peraturan Bupati Melawi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa bawah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada pasal 71 huruf b dilaksanakan untuk : a). Pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku, b). Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan, c). Penyelenggaraan kegiatan pembangunan, d). Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, e). Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang, f). Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, g). Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hubungan Kepala Desa serta lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa menjadi suatu relasi yang penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat taraf kehidupan masyarakat desa agar dapat memberikan nilai yang ekonomis bagi perdesaan (Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 13 Desember 2021 kepada Bapak Jaga selaku Kepala Desa Balai Agas dan Bapak

Panji S.Sos selaku Bupati Kabupaten Melawi. luas wilayah desa balai agas terdiri dari 1.064,08 Km² / 10.640,80 Are a . Terdiri dari 11 Kecamatan, 169 Desa/Kelurahan. Terdiri dari berapa titik Pembangunan Infastruktur perdesaan kurang lebih 36,000 Km² / 360.000 Area yang di gunakan sebagai pembangunan jalan yang menghubungkan desa dan kabupaten yang berjarak 80 Km² / 800.000 Are a dari ibu kota kabupaten Melawi, pembangunan listrik untuk perdesaan yang berjarak 90 km/ 900.000 Area, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK) dengan luas 500 M², Pembangunan Jalan Semenisasi di setiap Dusun seluas 738 M². Berdasarkan (PERBUP) Peratruran Bupati Melawi Nomor 15 Tahun 2017 tentang pedomana penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa bawah Jalan desa merupakan jalan umum yang digunakan akses penghubung kawasan dan antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan untuk menunjang kesejahraan masyarakat desa. Pada Tahun 2015-2022 Desa Balai Agas tercatat sebagai desa yang mengedepankan kearifan lokas kawasan perdesaan dalam pembangunan Desa. Namun pada kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat secara keseluruhan bertahun-tahun lamanya tidak ada satupun pembangunan infrastruktur desa yang mampu merubah keadaan desa kearah lebih baik. Observasi yang dilakukan didapati hasil bahwa pembangunan di 3 Dusun. Terdiri dari Dusun Lintah, Dusun Pintas, Dusun Sungai Duri, mengalami suatu permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Namun sampai saat ini pemerintah desa tidak mengambil tindakan apapun untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan apratur Desa, kurangnya pemantaun yang khusus terhadap kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa, dan kurangnya relasi masyarakat adat dalam

mengoptimalkan pembangunan perdesaan. Contohnya pembangunan infrastruktur perdesaan sampai saat ini masih mangkrak. Hal ini sangat berdampak pada pembangunan Desa dan Kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka studi ini menggunakan pendekatan *Governance* khususnya Relasi Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan dalam Pembangunan Desa Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Masalah yang penulis dapatkan dari sudut pandang secara relasi, seperti pembangunan jalan yang menghubungkan desa dan kabupaten, pembangunan listrik untuk perdesaan, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK), Pembangunan Jalan Semenisasi di setiap Dusun yang ada di desa sampai saat ini masih mangkrak. Asian Development Bank (1999), penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (*Good governance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya desa yang berada dalam pengelolaan pemerintah desa benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan. Pendekatan *Governance* merupakan suatu analisis hubungan pemerintahan dan masyarakat yang mempunyai saling ketergantungan dan membutuhkan terkhususnya wilayah Desa.

Sehingga penelitian ini "Fokus mengkaji" tentang Relasi Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pelaksana Pembangunan Desa Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dilihat dari pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan aparatur Desa, kurangnya pemantaun yang khusus terhadap kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa, kurangnya relasi masyarakat adat dalam mengoptimalkan pembangunan perdesaan dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat relasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Desa dan Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat relasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa.

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat dalam pembangunan desa dan strategi seperti apakah yang di lakukan pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah agar mampu mendeskripsikan Relasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu Manfaat Akademis dan Manfaat Teoritis :

1) Manfaat Akademis

Sebagai acuan untuk menambah referensi kaum intelektual terutama dalam mendapatkan gelar sarjana di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, berkaitan dengan Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Balai Agas dan menjadi bahan studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus permasalahan saat ini.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas bagi masyarakat, agar dapat partisipasi dan mengontrol terhadap pelaksanaan pembangunan desa sekaligus memperoleh pengetahuan empirik bagi Pemerintah Desa tentang pentingnya Relasi Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Desa.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Kajian Literatur

Pertama, Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B.,(2020). Melakukan penelitian mengenai Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, metode penelitian ini merupakan Penelitian lapangan lapangan (Field Research)

dianggap sebagai pendekatan luas dalam kajian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa di Desa Kayeli.

Kedua, Penelitian lain yang dilakukan oleh Dona Fauziah, (2017) mengenai relasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kasus pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat dilihat dari hubungan antara otoritas dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan finansial pada aktivitas tambang emas ilegal. Otoritas dan pengusaha aktor utama dalam kegiatan tambang emas ilegal dan melibatkan sejumlah tokoh publik yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Dampak hubungan yang terjadi sangat banyak negatif dari positif, penambangan ilegal sangat merusak lingkungan, budaya tatanan sosial, dan juga pemerintah setempat.

Ketiga, Dalam Skripsi Stanislaus, Yamun (2016) tentang *Hubungan BPD Dan Kepala Desa Sebagai Mitra Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Propinsi DIY*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan BPD dan Kepala Desa sebagai Mitra Kerja dalam Pembuatan Peraturan Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukan bawah Hubungan BPD dan Kepala Desa Condong Catur Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa; Berdasarkan proses Identifikasi Masalah BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah menjalankan peran mereka masing-masing sesuai dengan Tupoksinya, dan saling bekerja sama

dan berkoordinasi dalam melihat permasalahan yang ada di Desa dan nantinya akan dituangkan dalam pembuatan peraturan Desa, adapun kendala yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi dan saransaran.

Keempat, Dalam Tesis Baryono Buang, Prasetyo (2020) Tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul*. Menjelaskan bawah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan perencanaan di tingkat desa. Sesuai dengan ketentuan pasal 80 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan diselenggarakan oleh masyarakat desa”, sehingga masyarakat dituntut untuk ikut terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Namun pada kenyataannya masyarakat minin untuk berperan langsung dalam proses pelaksanaannya. tujuannya adalah untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2018 di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung kidul telah berjalan dengan baik, dilihat dari Partisipasi Masyarakat pada Tahap PraMusrenbang Desa diawali dengan Musyawarah Padukuhan untuk membahas berbagai masalah-masalah utama yang terjadi di Desa Hargomulyo, Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2018 di Desa Hargomulyo, telah

terlaksana dengan baik, dilihat dari partisipasi masyarakat yang begitu antusias dimana tahun 2018 kehadiran atau partisipasi masyarakat mencapai 70% dan perwakilan tokoh perempuan mencapai 30% dan Tahap Pasca- Musrenbang Desa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa adalah dengan turut serta dalam memberikan masukan Dan Arahan Terkait Finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kelima, Dalam Tesis Yanuaris, Mahuse (2020) tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2019*. Menjelaskan bawah Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses pemerintahan. Hasil penelitian bawah bentuk Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi, partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, Partisipasi warga adalah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik, warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek) tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian Literatur Review di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang relasi pemerintah desa dalam pembangunan. Namun juga Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan “ *Governance* ” seperti terdapat interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah khususnya Desa. Serta mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (*Good governance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya Negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara. Sehingga terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik yang salah satunya adalah Relasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

1. Governance

Asian Development Bank (1999), penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya suatu korelasi yang positif yang terjadi antara tata kelola pemerintahan dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan suatu iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan

yang baik (*Good Governnance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan kembali prinsip-prinsip *Good Governnance* sebagai berikut:

- 1) *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- 2) *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum.
- 3) *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah.
- 4) *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya.
- 5) *Concensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas.
- 6) *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan.

- 7) *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan.
- 8) *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*Civil Society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholdernya.
- 9) *Strategic Vision*; visi strategis, para pemimpin dan public harus memiliki perspektif *Good Governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa perspektif *Good Governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan. Selain itu, terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik.. Dengan begitu, *Governance* memiliki dimensi, yaitu transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian birokrasi pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola barang publik seperti melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. dalam institusi modern pemerintah desa tidak hanya sebagai legitimasi simbolik dan sosial namun harus dapat membangun dimensi kinerja ekonomi dan politik.

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki suatu susunan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, adapun landasan pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, dalam buku otonomi desa 2003:3).

Lembaga musyawarah desa adalah suatu wadah permusyawaratan atau suatu mufakat pemuka masyarakat desa dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan pada musyawarah

Kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan mengena atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Pemerintah Desa dalam arti administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri. Penamaan atau istilah desa, disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, dan sebagainya, susunan Sali tersebut bersifat istimewa. Pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan (APBD).

Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi penuh dari masyarakat.

1. Sebagai Dinamisator; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai Katalisator; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi

masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (*Loyalitas*) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Berdasarkan defenisi diatas menunjukkan bahwa kepala desa atau Hukum tua selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, Hukum Tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu dapat ditegaskan bawah Dari uraian di atas, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai

perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

3. Masyarakat Adat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, masyarakat Desa bisa memiliki pemerintahan desa yang otonom, dengan didukung anggaran yang kuat dari negara. Sementara itu, Undang-Undang desa ini memberikan hak dan akses bagi masyarakat adat untuk menghidupkan kembali desa adat sehingga terbuka munculnya kembali pemerintahan asli sebagai “*Self Governing Community*” yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Namun demikian, perjuangan masyarakat adat untuk meraih kedaulatan dan hak-hak tradisionalnya itu belum berbuah secara maksimal sejak Undang-Undang itu ditetapkan. Sehingga, berbagai masalah selalu muncul ketika kelompok-kelompok masyarakat adat berjuang untuk mengembalikan kedaulatan, kekayaan budaya dan kepemimpinan adat yang lebih aspiratif. Masalah tersebut berkaitan dengan kuatnya ketidak berdayaan sehingga masyarakat adat tidak mampu untuk bangkit secara mandiri. Selain itu masih kuatnya dominasi, dan proses marginalisasi masyarakat adat karena kuatnya kontrol negara, dan rezim kapitalis yang menguasai sumber daya.

Oleh karena itu, secara pembangunan secara yang nyata bersifat (*top down*), berpihak kepada pemodal, mengedepkan pertumbuhan dari pada pemerataan dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga masyarakat adat yang menjadi korban akibatnya para pemimpin

adat kehilangan kekuasaan diwilayahnya perlukan adanya gerakan sosial yang lebih terorganisir dan masif. Tidak kalah penting, kalangan akademisi dan praktisi juga perlu melakukan kajian yang mendalam yang secara kritis mengungkapkan berbagai liku-liku, kekurangan, harapan dan capaian dari gerakan masyarakat adat untuk menghidupkan kembali pemerintahan, kepemimpinan dan sumberdayanya. Gerakan masyarakat adat muncul sebagai akibat dari hadirnya Negara bekas jajahan yang ada di Indonesia. Pada orde baru ini masyarakat adat dalam ketidakdayaan sehingga kehilangan perannya sebagai komunitas yang dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Secara umum, pemberdayaan masyarakat adat Indonesia bawah mengalami marginalisasi sistematis ketika dalam pembangunan dibawah kendali rezim orde baru yang otoritarian (Hidayana, 2005). Secara, pembangunan secara nyata bersifat *top down*, berpihak kepada pemodal, mengedepkan pertumbuhan dari pada pemerataan dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga masyarakat adat yang menjadi korban akibatnya para pemimpin adat kehilangan kekuasaan diwilayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menggunakan aspek perjuangan masyarakat adat untuk meraih kedaulatan dan hak-hak tradisionalnya itu belum berbuah secara maksimal. Sehingga, penelitian ini mengkaji kerjasama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam pertumbuhan pemerataan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

4. Pembangunan Desa

Pengertian Pembangunan Desa Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sondang P.Siagian,(Purnomo, 2015:21) mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan

dikembangkan adalah pembangunan desa Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo (Purnomo, 2015:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Soewignjo (Purnomo, 2015:24) mengemukakan pembangunan desa yaitu perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara Taliziduhu Ndraha (Purnomo, 2015:71) mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas bawah keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang pikir, kegiatan dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui

pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup merupakan batas penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian ini agar berjalan sesuai dengan fokus didalam pelaksanaana penelitian ini, agar data dan informasi yang di ambil sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian tentang relasi pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan desa di lihat dari *Perspektetif Governance* adalah :

1. Dilihat dari *Prespektif Gavernance* Apakah Relasi Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Adat telah mampu mengedepakan pembangunan Desa.
2. Faktor-faktor Apakah yang mendukung dan menghambat antara Pemerintah Desa dan Masyarakt Adat dalam proses Pembangunan Desa.

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Eksplorasi yang dimana memiliki posisi tertentu dalam perspektif governance yang mampu memandang data dari keseluruhan wahana penelitian serta titik berdiri yang terpisah dari verifikasi serta konfirmasi yang bersifat konseptual. Selain itu, mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru antara suatu perencanaan yang formal, sehingga pelaksanaannya tergantung pada kepandaian serta daya imajinasi dari riset yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini konsentrasi pada Eksploratif yang bertujuan untuk memproduksi generalisasi yang diturunkan dari proses induktif, proses aktivitas, atau situasi yang saat ini dipelajari (Given, 2008). Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan data informan yang berdasarkan pada kenyataan (fakta) dilapangan. Selain itu, dalam perspektif governance yang mampu memandang data dari keseluruhan rangkaian wahana penelitian sehingga mampu menggali lebih dalam informan yang mengamati relasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam Pembangunan Desa.

a) Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

b) Obyek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tentang tentang Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

c) Subyek Penelitian (Informan)

Subyek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Dan Dewan Adat Dayak Serta Masyarakat yang ada di Desa Balai Agas.

Alasan memilih subyek penelitian diatas karena subyek berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan subyek mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian.

d) Informan

Informan merupakan orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive, dimana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yaitu: kepala desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur. Perencanaan, Kaur. Keuangan, dan empat orang Keterwakilan

Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dengan demikian, informan dalam penelitian berjumlah 9 Orang sebagai :

Tabel I.1
Jumlah Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Yulianus Jaga	Kepala Desa	SMA	1
2.	Saleh Melintang	Serketaris Desa	SMA	1
3.	Susanto	KASI Pemerintahan	S1	1
4.	Angas	KASI pembangunan	SMA	1
5.	Sukiman	Ketua BPD	SMA	1
6.	Bujang Aliyus	KAUR Umum	SMA	1
7.	Pit Marsela	KAUR Keuangan	SMA	1
8.	Bapak Doi	Dewan Adat Dayak (DAD)	SMP	1
9.	Bapak Amir	Masyarakat Adat	SMA	1

Sumber Data Primer

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode Deskriptif Kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi:

a. Observasi

Observasi disebut pula sebagai pengamatan merupakan memungkinkan pengamatan untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penelitian, hidup saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu (Moleong, 2018). Selain itu, bawah pengamatan atau suatu Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sesuatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno dalam Prastowo, 2016:220). Jadi observasi

adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan itu sendiri juga perilaku individu yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

b. Wawancara

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara bertahap (in-depth). Wawancara yang penelitian gunakan adalah Metode wawancara yang mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2017:111). Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terkait Relasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi Dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Dan Dewan Adat Dayak Serta Tokoh-Tokoh Masyarakat Sebagai Penerima Pelayanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah alat tulis, rekaman, kamera, foto sebagai proses pengambilan data, Profil Desa, APBDes, RPJMDes, RKPDes, LPJDes, Peraturan Desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataanya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data (Sugiyono, 2017: 131-132).

Dalam tahap analisis data ini penelitian menjadi sangat penting, karena dengan analisis data inilah data akan nampak manfaatnya terlenih lagi ketika memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Untuk meperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun focus penelitian, maka penliti akan menggunakan tiga langkah utama yang di kemukakan oleh Miles & Humberman dalam Sugiyono (2017 : 134-142), sebagai berikut :

a) *Data Collectio* (Pengumpulan Data)

Dalam penlitian kualitatif mengumpulkan data dengan Observasi, Wawancara mendalam, dan Dokumentasi atau Gabungan ketiganya (*Triangulasi*).

Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi social/obyek yang

diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Pada saat pengumpulan data ini peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi yang ada dilapangan mengenai Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Blai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, agar data yang di peroleh sangat banyak dan sangat bervariasi.

b) *Data Rediction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kullitatif adalah Pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono, 2017:137).

Pada saat reduksi data ini penelitian akan mengupulkan data dan merangkumnya sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat bagaimana Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Blai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dan masalah apa saja yang menjadi kendala dalam proses Pembangunan tersebut. Hal tersebut dikumpulkan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

c) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, pengajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katgori. Menurut Miles & Humberman (1984) dalam Sugiyono (2017, 137), “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.

Yang sering kali digunakan untuk pengajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sajian yang dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Blai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

a. *Verification Atau Conclusion Drawing*

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2017: 142).

Temuan tersebut seperti deskripsi atau gabungan suatu obyek yang sebelumnya masi abu-abu atau tidak nyata sehingga diteliti menjadi jelas. Dalam tahap ini penelitian bermaksud untuk menentukan data yang sifatnya masi bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat. Hal tersebut ditunjukkan nantinya untuk menjawab data permasalahan mengenai

Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Blai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

b. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability* (Sugiyono, 2017) Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
- c. Triangulasi Waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke

waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui obeservasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali saja.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

BAB II

PROFIL DESA BALAI AGAS

A. SEJARAH DESA BALAI AGAS

1. Asal Usul Desa Balai Agas

Pada awalnya desa Balai Agas belum dihuni oleh manusia. Turunlah Dayang Serba Ada dari langit melalui seutas tali membawa benda-benda di dalam Pelangka berisi padi, beras, bibit tanaman sayuran yang tumbuh di ladang seperti kacang panjang (Rotak), labu, mentimun, perenggi, bayam dan lain sebagainya. Selain itu Dayang Serba Ada juga membawa alat-alat untuk menjahit seperti: gunting, benang, jarum, dan kain bererang. Ia juga membawa alat-alat memasak seperti sampau (periuk), kual, garam, minyak, cabe (rangki), dan sendok.

Tiga hari kemudian muncullah Bujang Gelinjing dari dalam air di atas sebuah batu yang bernama batu tunggal (batu ini berada di sebelah kiri jika kita mudik ke dusun Lintah, desa. Balai Agas). Adapun benda-benda yang dibawanya dari dalam air yaitu berupa benda-benda pusaka, diantaranya yaitu Gantang tembaga (sebuah alat untuk menakar beras yang terbuat dari tempurung kelapa), kulak tembaga dan pedang Raja Tamai.

Bujang Gelinjing bertanya-tanya dalam benaknya “dimana gerangan penghuni daerah ini?” karena menurut hematnya pasti ada seseorang yang menghuni daerah tersebut. Bujang Gelinjing berusaha untuk menemukan penghuni daerah tersebut, ia mudik ke hulu sungai dengan berjalan kaki menyusuri pinggir sungai, hingga sampai ke hulu sungai Kembuyung. Tepat

seperti dugaannya, Bujang Gelinjing akhirnya bertemu dengan seorang manusia yaitu Dayang Serba Ada.

Terjadilah percakapan diantara Bujang Gelinjing dan Dayang Serba Ada :

Bujang Gelinjing : “Tuan Putri darimana asal anda?”

Dayang Serba Ada : “Aku datang dari langit dan turun ke bumi dengan Menggunakan pelangka. Tuan sendiri berasal darimana?”

Bujang Gelinjing : “aku datang dari dalam air, dan mendarat di atas batu tunggal.”

Dayang Serba Ada : “apa yang tuan bawa dari dalam air?”

Bujang Gelinjing : “aku membawa Gatang Tembaga, kulak tembaga dan pedang raja tamai. Kalau tuan Putri sendiri, apa yang tuan putri bawa dari langit?”

Dayang Serba Ada : “aku membawa padi, beras, bibit sayuran ladang, alat-alat menjahit dan alat dapur.”

Setelah panjang lebar bercerita mengenai asal-usul masing-masing akhirnya Dayang Serba Ada mempersilahkan Bujang Gelinjing untuk masuk ke rumahnya dan menawarkan Bujang Gelinjing untuk makan, minum serta beristirahat sejenak di rumahnya. Gayung bersambut Bujang Gelinjing menerima tawaran dari Dayang Serba Ada untuk makan. Dayang Serba Ada menghidangkan nasi dan sayur seadanya kepada Bujang Gelinjing dan mereka makan bersama. Dalam kebersamaan tersebut mereka

saling berpandangan mata, maka timbullah rasa ketertarikan diantara dua insan berbeda tersebut.

B. VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA BALAI AGAS

a. Visi

“Terwujudnya Desa Balai Agas Sebagai Desa Yang Mandiri Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Sehat Dan Lebih Sejahtera”.

b. Misi

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuhnya dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, keadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

C. KONDISI GEOGRAFIS DESA BALAI AGAS

1. Batas Administrasi

Secara administratif Desa Balai Agas merupakan desa yang berada di pedalaman Kalimantan Barat tepatnya di kabupaten Melawi dan akses untuk menuju desa terbilang sulit karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dengan memiliki batas-batas Wilayah secara koordinat sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Nang Raya, Kabupaten Melawi.

Sebelah Timur : Desa Sungai Segak, Kabupaten Melawi.

Sebelah Selatan : Desa Langan, Kabupaten Melawi.

Sebelah Barat : Desa Sembilan Dua, Kabupaten Melawi.

2. Topografi Desa Balai Agas

Secara topografi Desa Balai Agas merupakan desa yang terbilang tidak strategis karena berada pada pedalaman yang wilayahnya masi hijau luas Desa Balai Agas 111.320263 BT / -0.556367 LS. Hal ini menyebabkan akses untuk menuju Desa Balai Agas sangat sulit. Apabila curah hujan berkepanjangan. Sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pembangunan Desa Balai Agas. Balai Agas adalah desa yang terletak di daerah perbatasan sebagai berikut :

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 60,0000 KM.
 Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 75,0000 KM.
 Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 297,0000 KM.

Rawan Bencana Alam sebagai berikut :

Rawan Banjir (Ha) : -
 Potensial Tsunami (Ha) : -
 Rawan Jalur Gempa (Ha) : -

3. Luas Wilayah Desa Balai Agas

Luas wilayah Desa Balai Agas keseluruhnya 36.000,0000 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.I
 Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan Tanah	Jumlah (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	200.000	0,05
2.	Pekarangan	150.000	0,04
3.	Tanah rawa	800.000	0,2
4.	Pasang surut	0	0
5.	Lahan gambut	0	0
6.	Situ/waduk/danau	4.000.000	1,1
7.	Perkebunan	241.800.000	67,1
8.	Tanah kas desa	2.000.000	0,5
9.	Fasilitas umum	720.000	0,2
10.	Hutan	86.330.000	23,9
11	Sawah	2.000.000	0,5
12	Tegal/ladang	20.000.000	5,5
Total		360.000.000	100

Sumber Data Profil Desa Balai Agas 2023

Dari tabel di atas menunjukan bahwa tanah di Desa Balai Agas banyak digunakan sebagai perkebunan dengan luas 241.800.000 ha atau 67,1% dari luas tanah keseluruhan. Dalam pemanfaatnya tanah perkebunan Desa Balai Agas menjadi sumber pendapatan masyarakat.

D. DEMOGRAFIS DESA BALAI AGAS

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2022 jumlah penduduk yang tercatat secara administratif di desa Balai Agas 1.716 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 912 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 804 jiwa, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jiwa	Persentase
1.	Laki-Laki	912	53
2.	Perempuan	804	47
Total		1.716	100

Sumber Data Profil Desa Balai Agas 2023

Berdasarkan data dari Tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Balai Agas lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu 912 jiwa (53%) dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan 108 (6,2%)

E. SOSIAL EKONOMI DESA BALAI AGAS

Keadaan sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan kehidupan dalam bermasyarakat, dimana terjadinya interaksi antar individu dengan individu lainnya yang saling membutuhkan sehingga terjadi proses komunikasi. Keadaan sosial di Desa Balai Agas menunjukkan bahwa penduduk desa memiliki interaksi yang baik antar sesama penduduk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan gotong royong dan setiap penduduk memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari investigasi aspek ekonomi, mata pencaharian di Desa Balai Agas sangat bervariasi, tetapi

mayoritas dari mata pencaharian masyarakat adalah petani. Hasi Data 2022 menunjukkan bawah :

Tabel III.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Balai Agas

No.	Mata Pencaharian	Jiwa	Persentase
1.	Petani	325	48,6
2.	Buruh tani	12	1,7
3.	PNS	9	1,3
4.	Pembantu rumah tangga	2	0,29
5.	Wiraswasta	7	1
6.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	15	2,24
7.	Belum bekerja	40	6
8.	Pelajar	144	42,6
9.	Ibu rumah tangga	108	32
10.	pensiunan	1	0,29
11.	Perangkat desa	3	0,8
12.	Karyawan honorer	2	0,59
Total		668	100

Sumber Data Profil Desa Balai Agas 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Balai Agas bekerja sebagai petani sebanyak 325 jiwa atau (48,6%).

F. SARANA PRASARANA DESA BALAI AGAS

1. Pendidikan

Prasarana seperti Fasilitas Pendidikan Dan Sosial di Desa Balai Agas sebagai berikut :

Tabel II.4
Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Balai Agas

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Gedung SMP	1
Total		1

Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh informasi bahwa Desa Balai Agas memiliki fasilitas Gedung Sekolah Menengah Pertama yang dapat digunakan untuk menunjang Pendidikan.

Tabel II.5
Jumlah Fasilitas Peribadatan Desa Balai Agas

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Gereja Katholik	2
2.	Masjid	1
Total		3

Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Desa Balai Agas memiliki fasilitas tempat peribadatan seperti Gereja 2 unit dan Masjid dengan jumlah 1 unit.

Tabel II.6
Jumlah Fasilitas Kesehatan & Tenaga Medis Desa Balai Agas

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik/balai pengobatan	1
2.	Posyandu	3
Tenaga Kesehatan		
3.	Tenaga medis	1
Total		5

Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan di Desa Balai Agas masih sedikit dan kurang memadai sehingga diperlukan adanya perbaikan fasilitas agar membantu masyarakat di Desa Balai Agas.

Tabel II.7
Jumlah Fasilitas Umum Desa Balai Agas

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Air bersih(mata air)	4
2.	MCK umum	29
3.	Jamban keluarga	5
5.	Saluran drainase	3
6.	Lapangan voli	8
Total		49

Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Desa Balai Agas memiliki fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti adanya MCK dan jamban yang dibangun

Tabel II.8
Jumlah Prangkat/ Pamong Desa Balai Agas

No.	Nama	Jabatan
1.	Yulianus Jaga	Kepala Desa
2.	Saleh	Sekretaris Desa
3.	Fit Marsela Sari	Kaur keuangan
4.	Supriman	Ketua BPD
5.	Doy	Dewan Adat Dayak
6.	Angas	Kasi Pembangunan
7.	Susanto	Kasi Pemerintahan
8.	Bujang Alius	Kaur desa
9.	Amir	Masyarakat desa

Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bawah Desa Balai Agas memiliki prangkat/pamong Desa yang bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawabnya.

G. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BALAI AGAS

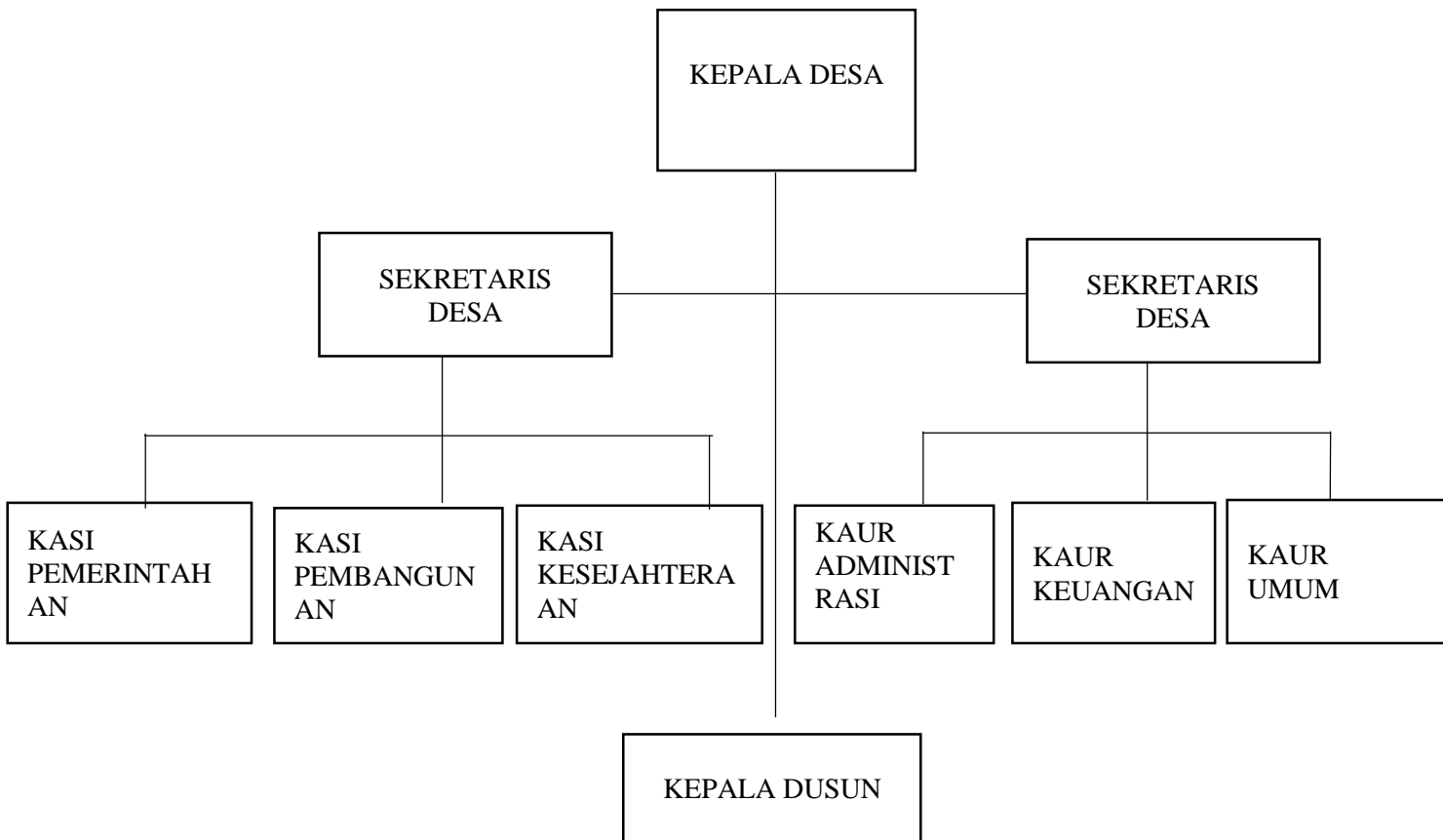
Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Desa Balai Agas merupakan desa yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Sturktur Organisasi Desa Balai Agas sebagai berikut :

Bagan II.1

Sturktur Organisasi Desa Balai Agas



Sumber Data Profil Desa Balai Agas Tahun 2023

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balai Agas di atas, bahwa Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan , Kasi Pelayanan, Kaur TU Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Dusun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Desa Balai Agas Kabupaten Melawa Kalimantan barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Relasi Pemerintah Desa dan masyarakat adat di dapatkan bahwa sampai saat ini usulan yang diberikan belum terealisasi dengan baik semua itu hanyalah suatu wawacana Pemerintah Desa Balai Agas kepada masyarakat adat dan pemerintah desa dinilai melakukan rencana pembangunan secara tertutup tanpa memberikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dalam waktu dekat akan ada kegiatan pembangunan dalam bidang ifrastrukturt desa serta pembangunan yang dilakukan tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa Balai Agas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kurang berjalan optimal baik dalam bidang pembangunan fiisik maupun non fisik. Selain itu, Upaya dalam meningkatkan pembangunan desa menurut hanyalah hanya Formalitas saja atau asal-asal saja, usulan masyarakat kurang ditanggapi oleh aparat/pamong desa. Seperti, pemerintah desa tidak melakukan rapat bersama masyarakat adat untuk menentukan arah perencanaan pembangunan kedepannya, anggran yang tersedia tidak di publikasikan secara terbuka, pemberian proyek pembangunan pada oknum krabat-krabat terdekat dan pekerjaan tersebut menjadi mangkrak tidak adanya proses pertanggungjawaban.

Pemerintah desa memiliki sifat dan karakteristik dalam pelayanan, adapun sifat yang wajib dimiliki yaitu adanya transparansi dengan masyarakat atau penduduk sehingakan masyarakat dapat mengetahui rancangan kerja maupun pembangunan bagi desa, akan tetapi tak jarang sifat transparansi tidak dilakukan oleh pemerintah. Desa Balai Agas merupakan desa yang berada di Kalimantan Barat, yang memiliki perangkat desa yang bertugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, adapun upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pembangunan desa. Dalam hal ini tentunya membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, namun pada kenyataannya relasi yang terjalin tidak cukup baik, karena kurangnya informasi yang diberikan pemerintah dalam perencanaan atau bisa dikatakan pemerintah melakukan suatu kegiatan pembangunan tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan yang telah di paparkan, maka Penulis memberikan saran terkait relasi pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi sebagai berikut:

1. Pemerintah harus transparan dalam program pembangunan di Desa Balai Agas dan selalu melibatkan masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat/warga desa dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tugas dari BPD di Desa Balai Agas.
3. saran untuk pembaca dan materi dan penguatan kapasitas re vitasnsi terhadap Lembaga Adat Desa Balai Agas di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhudianto, W. (2014). Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan pedesaan. *Transformasi*, 1(26).
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang Mudjiyanto. (2018). Tipe penelitian eksploratif komunikasi Exploratory research in communication study.
- Ermaya, B. S. (2016). Kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 16(2).
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fauziah, D., & Ishak, I. (2017). *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nizamullah, D., & Abdullah, S. (2014). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2010-2012). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Rosdiana, S. (2017). *Adat dan Kekuasaan (Studi terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Prasetyo, T. (2020). *Derajat Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Studi Kasus: Pengelolaan*

BUMDes Gerbang Merapi Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Ra'is, D. U. (2018). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1).

Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Adm J Ilm Adm Publik dan Pembang*.

Skripsi

Stanislaus, Y. (2016). Hubungan BPD Dan Kepala Desa Sebagai Mitra Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi DIY.

Wahyudin, K. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Tesis

Baryono Buang, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 Penelitian di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, STPMD" APMD").

Yanuaris, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 (Penelitian di kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral dissertation, STPMD" APMD").

Sumber Buku

Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.

Widjaja, (2003:3). Dalam Buku Tentang Otonomi Desa.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman
Pembanguna Desa.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Budaya Kerja.

Peratruran Bupati Melawi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedomana Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menegeah Desa Dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

SURAT PERMOHONAN IZIN TUGAS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id


SURAT TUGAS

Nomor : 125/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Nikodemus Yorgi Barabis
Nomor Mahasiswa : 18520197
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi
b. Sasaran : Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi di Lihat dari Perspektif Governance
c. Waktu : 23 Maret 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Ketua

Dr. Sutono Eko Yunanto
170.230.190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 208/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 23 Maret 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Nikodemus Yorgi Barabis
No Mhs : 18520197
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi di Lihat dari Perspektif Governance
Tempat : Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi
Dosen Pembimbing : Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Ketua

Dr. Sulong Eko Yunanto
170.230.190

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bapak boleh bercerita sejak kapan bapak menjadi kepala desa di desa ini ?
2. Bagaimana kualitas pelayanan dalam pembangunan desa yang di oleh pemerintah desa ?
3. Apa yang menjadi tolak ukur pemerinrtah desa mengenai pembangunan yang terjadi saat ini ?
4. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa saat ini ?
5. Bagaimana sikap pemerintah desa apabila ada masyarakat adat yang memberikan usulan mengenai pembangunan infrastruktur desa ?
6. Apakah di pemerintah desa ini ada rapat khusus bersama masyarakat adat untuk membicarakan kekukarangan dalam pembangunan desa ? kalau memang ada berapa kali dalam sebulan ?
7. Apa kendala selama ini yang pemerintah desa hadapi dalam setiap kali melakukan pembanguna desa ? mengapa tidak ada perubahan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa ?
8. Apabila misalkan ada terombosan baru dalam perencanaan dalam pembangunan apakah adanya komunikasai yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adat ?
9. Bagaimana Relasi Antara Pemerintah Desa Dan Masyyyarakat Adat Dalam Pembangunan Desa Di Tahun 2020 Sampai Dengan Saat Ini ?
10. Apa kengulan dari pembangunan desa yang di rencanakan oleh pemerintah desa ?
11. Apakah ada ruang yang bebas yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adat dalam pelaksanaan pemabangunan desa ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Yulianus Jaga Selaku Kepala Desa Balai Agas



Wawancara Bersama Bapak Saleh Melintang Selaku Serketaris Desa Desa Balai

Agas



Wawancara Bersama Ibu Pit Marsela selaku KAUR Keuangan Desa Desa Balai

Agas



Wawancara Bersama Bapak Susanto selaku KASI Pemerintahan Desa Desa Balai

Agas



Wawancara Bersama Bapak Bujang Aliyus Selaku KAUR Umum Desa Desa

Balai Agas



Wawancara Bersama Bapak Angas Selaku KASI Pembangunan Desa Desa Balai

Agas



Wawancara Bersama Bapak Sukiman selaku Ketua BPD Desa Desa Balai Agas



Wawancara Bersama Bapak Doi selaku Dewan Adat Dayak (DAD) Desa Desa Balai Agas



Wawancara Bersama Bapak Amir selaku Masyarakat Adat Desa Desa Balai Agas

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA BALAI AGAS



Pembangunan Jalan Antar Dusun Sungai Duri Ke Desa Balai Agas



Pembangunan Jembata Dusun Sungai Duri Ke Desa Balai Agas



Pembangunan Kantor Desa Balai Agas



Pembangunan Logo Desa Balai Agas



Pembangunan Rumah Adat Dayak Desa Bali Agas